

Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara

Desfiandri Rahmadani Amri^{1*}, Zulkipli Lessy²

¹² Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
desfiandri12@gmail.com, zulkipli.lessy@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

The discourse regarding economic equality in the development of the Indonesian Capital City (IKN), focuses on key aspects such as infrastructure, environmental sustainability, economic regulations, and empowerment of local communities. Through discourse analysis methods, this research explores the narratives and language used by stakeholders regarding IKN projects in the context of infrastructure, environmental sustainability aspects, economic regulations. empowering local communities By analyzing discourse related to the IKN project, this research seeks to provide in-depth insight into how economic equality is integrated into IKN development. The implications of these findings can be used as a guide for planning and implementing similar projects in the future.

Keywords: *Economic Equity, National Development, Archipelago Capital*

ABSTRAK

Diskursus mengenai pemerataan ekonomi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), fokus pada aspek-aspek kunci seperti infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, regulasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui metode analisis diskursus, penelitian ini mengeksplorasi narasi dan bahasa yang digunakan oleh pemangku kepentingan terkait proyek IKN dalam konteks infrastruktur, aspek keberlanjutan lingkungan, regulasi ekonomi. pemberdayaan masyarakat lokal Dengan menganalisis diskursus terkait proyek IKN, penelitian ini berupaya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemerataan ekonomi diintegrasikan ke dalam pembangunan IKN. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan sebagai panduan untuk perencanaan dan implementasi proyek serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pemerataan Ekonomi, Pembangunan Nasional, Ibu Kota Nusantara*

PENDAHULUAN

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional suatu negara, termasuk dalam konteks pembangunan ibukota Indonesia yang baru yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan yang merata tidak hanya mencakup distribusi pendapatan, tetapi juga pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Sebuah pandangan baru terhadap proses pembangunan perlu ditujukan pada pencapaian pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*)

(Rustiadi E, 2009). Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diskursus mengenai pemerataan ekonomi di Ibu Kota Nusantara menjadi perbincangan yang sangat penting.

Pemerataan tidak berarti mewujudkan pembangunan yang identik di seluruh daerah, tetapi lebih pada optimalisasi potensi serta mendorong berbagai keunikan masing-masing wilayah sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh area tersebut (Priadi, 2018). Ibu Kota Nusantara, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi suatu negara, seringkali menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalamnya dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diskursus mengenai pemerataan ekonomi di ibukota nusantara melibatkan pertimbangan yang mendalam terkait kebijakan-kebijakan yang perlu diimplementasikan untuk menanggulangi disparitas ekonomi.

Jika kita melihat lebih dalam, Pulau Jawa dianggap sebagai pusat peradaban Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 59 persen terhadap perekonomian nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,52 persen. Angka ini sangat berbeda dengan kontribusi daerah lain seperti Sumatera, yang hanya berkontribusi sebesar 21,31 persen. Tingginya ketergantungan pada perekonomian Jawa telah menyebabkan Indonesia sering disebut sebagai "Jawasentris" yang mengindikasikan bahwa seluruh pusat kegiatan negara berada di Pulau Jawa. Belum lagi dengan jumlah kepadatan penduduk yang 50% lebih berada di pulau Jawa, pemerintah, dengan tujuan menciptakan distribusi yang merata, telah mengambil langkah-langkah percepatan dalam pemindahan ibu kota, mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Mazda, 2022).

Tahun 2022 memegang peranan penting dalam sejarah proses kebijakan pemindahan ibu kota baru, yang ditandai oleh pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Walaupun gagasan pemindahan IKN pertama kali diusulkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dan pernah juga diwacanakan oleh beberapa presiden lainnya, namun ide tersebut tidak pernah terealisasi. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, keputusan untuk memindahkan IKN dari pulau Jawa diambil, sejalan dengan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Asmorowati S, 2022).

Perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi, pengamat kebijakan, dan masyarakat umum. Kontroversi seputar potensi manfaat, permasalahan, dan ketidakpastian hukum terkait pemindahan ibu kota negara menjadi elemen krusial yang mendorong pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme dan regulasi terkait relokasi ibu kota negara dengan lebih transparan dan terarah. Diantara alasan di balik pemindahan ibu kota ini didorong oleh pertimbangan bahwa kesenjangan antara

beberapa daerah di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, terutama dalam hal distribusi penduduk, tingkat perekonomian, krisis air bersih, dan tingginya laju konversi lahan yang diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya turut menjadi pertimbangan dalam konteks pemindahan ibu kota ini (Asmorowati S, 2022).

Menurut Visi Indonesia 2033 pada tahun 2010, pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan negara diharapkan akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pusat kegiatan baru yang mendekati sebagian besar daerah tertinggal dan pinggiran yang sebelumnya jarang mendapatkan dampak dari proyek pembangunan seperti transmigrasi dan percepatan pembangunan daerah (Hutasoit, 2018). Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah aksesibilitasnya yang mudah, terletak dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda. Daerah ini memiliki penduduk yang beragam dan terbuka, dengan potensi konflik yang rendah. Selain itu, Kalimantan Timur dilengkapi dengan infrastruktur utama yang baik, didukung oleh adanya bandara dan pelabuhan (Saraswati & Adi, 2022). Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diharapkan dapat membantu meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan secara nasional. Selain itu, diharapkan pula bahwa perpindahan ibu kota akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemerataan ekonomi di Ibu Kota Nusantara. Mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur yang merata, hingga dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan di berbagai wilayah. Selain itu, aspek kebijakan fiskal dan moneter juga turut menjadi bagian integral dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan pemerataan ekonomi ini. Selain itu, investigasi secara mendalam terhadap argumen-argumen dukungan dan penolakan terhadap pembangunan ini akan dimasukkan pula melihat perdebatan akademik yang terjadi didalamnya. Dengan membahas secara komprehensif diskursus pemerataan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional Ibu Kota Nusantara, diharapkan munculnya pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional di Ibu Kota Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai diskursus pemerataan ekonomi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara menjadi sangat penting dalam kerangka upaya mencapai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan Buku Saku Pemindahan IKN, terdapat lima alasan mengapa Kalimantan Timur menjadi tempat pemindahan Ibu Kota. Pertama, minimnya risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, gempadan tsunami. Kedua, lokasinya yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, Lokasi IKN yang dekat dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). Keempat, infrastruktur yang terdapat di Balikpapan dan Samarinda relatif lengkap. Kelima, pemerintah dan juga BUMN memiliki lahan sebesar 180.000 hektar yang dapat mengurangi biaya pembangunan (Siti Jubaidah, 2022). Diskursus ini mencakup sejumlah aspek yang perlu diperhatikan guna memastikan bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat.

A. Infrastruktur

Pemerataan pembangunan dan infrastruktur dapat dinilai melalui tingkat disparitas wilayah. Semakin rendah tingkat ketidaksetaraan, semakin merata perkembangan pembangunan (Priadi, 2018). Sebagai aktor utama dalam pengembangan infrastruktur, pemerintah perlu memastikan kelanjutan dan prioritas investasi dalam pembangunan infrastruktur dalam kerangka rencana pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar infrastruktur dapat ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, untuk memastikan koordinasi yang baik antar sektor dan wilayah, pendekatan dalam pembangunan infrastruktur harus lebih terintegrasi (Ritonga, 2017).

Infrastruktur yang berkualitas tinggi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi. Oleh karena itu, infrastruktur juga berperan sebagai pendorong dalam menciptakan kondisi investasi yang mendukung. Keberadaan jalan yang baik, pelabuhan yang memadai, pasokan energi yang memadai untuk perusahaan, serta ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi dapat secara positif memengaruhi aktivitas investasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, tingkat pengeluaran dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam membiayai peningkatan dan perbaikan infrastruktur (Latip, 2009).

Periode pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) dimulai pada tahun 2022 dan melibatkan tahapan perencanaan jangka panjang hingga tahun 2045. Secara umum, proses pembangunan dibagi menjadi lima tahap, masing-masing Tahap I (2022-2024), Tahap II (2025-2029), Tahap III (2030-2034), Tahap IV (2035-2039), dan Tahap V (2040-2045).

Pelaksanaan proyek IKN melibatkan berbagai instansi, antara lain Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Otorita IKN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta (Saraswati & Adi, 2022).

Infrastruktur memegang peran krusial dalam keberhasilan dan kelangsungan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (IKN). IKN merupakan wilayah yang dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Keberadaan infrastruktur yang memadai di ibu kota yang baru menjadi krusial karena salah satu alasan utamanya adalah untuk menjamin akses setara terhadap segala sektor yang ada dan berkualitas bagi seluruh warga negara, tanpa memandang lokasi geografis mereka. Membangun semua fasilitas yang mendukung di IKN tentu diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan yang biasanya muncul antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Rencana-rencana beragam telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Implementasi perencanaan ini secara tidak langsung terkait dengan peningkatan perkembangan wilayah penyangga. Sampai saat ini, belum ada pembahasan terbuka lebih lanjut mengenai peran yang akan diemban oleh setiap kabupaten atau kota terdekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (IKN) di masa mendatang. Meskipun demikian, pada umumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pembangunan infrastruktur guna mendukung pusat pertumbuhan industri di tiga pusat industri hilir (Rustan, 2021).

Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi inti dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau. IKN diharapkan berfungsi sebagai landasan untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, IKN juga akan menjadi basis untuk pengembangan Smart City dan layanan digital, transformasi pendidikan abad ke-21, serta pengembangan sektor pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.

Kemudian, infrastruktur eksisting dan aksesibilitas Ibu Kota Negara (IKN) terletak dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang, dengan dukungan infrastruktur yang

memadai. Lokasi ini memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, serta mudah diakses karena dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Beberapa infrastruktur utama yang telah tersedia meliputi jalan tol Balikpapan-Samarinda dan trans Kalimantan, Bandara SAMS Sepinggian di Balikpapan, Bandara APT Pranoto di Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau di Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang di Samarinda.

Dengan mempertimbangkan besar cadangan sumber energi yang beragam di Kalimantan, baik yang bersifat tak terbarukan (fosil) maupun terbarukan, aspek "*energy availability*" tidak menjadi masalah besar bagi ibu kota baru di Kalimantan. Meskipun demikian, penyediaan energi di Kalimantan, terutama dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) yang memicu peningkatan permintaan energi, perlu memperhatikan banyak faktor lainnya. Kualitas atau keandalan sistem penyediaan energi di Kalimantan juga harus ditingkatkan untuk memenuhi standar sebuah IKN, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan energi. Konektivitas energi antar propinsi, bahkan dalam propinsi di Kalimantan, juga harus diperluas dan diperbaiki, bahkan mungkin dikembangkan sejajar atau lebih baik daripada yang telah ada selama ini, untuk mengakomodasi kebutuhan pasar di luar Kalimantan (Saraswati & Adi, 2022).

B. Regulasi dan Kebijakan Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan juga merupakan bagian dari upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah timur. Pemindahan Ibu Kota Nusantara diarahkan untuk mendukung pemerataan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi di seluruh Indonesia secara efisien. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi peluang pekerjaan yang tersedia di berbagai wilayah di Indonesia (Pribadi & Utomo, 2022).

Pertumbuhan ekonomi modern sering ditandai oleh pemusatan aktivitas industri di lokasi tertentu, yang dapat mengakibatkan ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar wilayah (Dian Noviyanti, 2020). IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Sejauh ini, Jakarta dan sekitarnya dikenal sebagai pusat segala hal, seperti pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen, meskipun wilayahnya hanya 664,01 km² atau 0,003 persen dari total luas daratan Indonesia sebesar 1.919.440 km². Populasinya mencapai 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa pada tahun 2020.

Ketidakmerataan ini telah menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan yang tidak merata di Indonesia, dengan fokus pembangunan yang terpusat di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini tidak mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menghambat optimalisasi potensi daerah, mengurangi keadilan antar daerah, dan meningkatkan risiko terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, IKN di Kalimantan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan harapan menjadi "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia, khususnya di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN di Kalimantan diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara maksimal (Arfani, Sari, & Seprtianti, 2023).

Dalam konteks mendesakannya tindakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), perlu disadari bahwa penyelesaian proyek ini harus dilakukan secepat mungkin. Dengan mengacu pada Visi Indonesia 2045 atau Indonesia Maju, diharapkan ekonomi negara ini akan mencapai peringkat kelima terbesar di dunia pada tahun 2045. Proyeksi ini mencakup perkiraan PDB per kapita sebesar US \$23.119 pada waktu tersebut. Untuk mencapai ambisi ini, pembangunan IKN menjadi krusial, dan tindakan cepat diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek ini sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang negara. Dengan demikian, kesadaran akan urgensi penyelesaian IKN telah menjadi suatu keharusan dalam rangka mendukung visi dan tujuan pembangunan nasional (Arfani, Sari, & Seprtianti, 2023).

Diprediksi bahwa Indonesia akan berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah pada tahun 2036. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan transformasi ekonomi yang diperlukan untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Revolusi industri diharapkan akan memperkuat transformasi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, penegakan peraturan yang ketat, dan reformasi birokrasi. Proses ini dimulai pada tahun 2020 dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2024-an. Oleh karena itu, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap penting karena dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat dalam mewujudkan transformasi ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dijelaskan melalui tiga unsur utama, yaitu *Regional Share*, *Proportionality Shift*, dan *Differential Shift*. Unsur *Regional Share* mencakup pengaruh dari luar, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari kegiatan ekonomi daerah tetangga yang berdekatan. Unsur *Proportionality Shift* mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi sektoral daerah tersebut yang tumbuh dengan cepat, didukung oleh potensi ekonomi lokal. Sementara itu, *Differential Shift* mencakup potensi khusus daerah tersebut karena adanya sumber daya alam tertentu, seperti kesuburan lahan, keberadaan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan posisi geografis.

yang sangat strategis karena dekat dengan pasar. Keseluruhan faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk membentuk dinamika pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Sjahrizal & Umiyati, 2018).

Sesuai dengan visi superhub Ekonomi, Ibu Kota Negara (IKN) akan direalisasikan melalui pembangunan enam klaster ekonomi yang berbeda. Pengembangan keenam klaster ini didasarkan pada upaya meningkatkan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan Timur, sekaligus memperkenalkan sektor-sektor maju yang berorientasi pada teknologi tinggi dan keberlanjutan. Klaster-klasternya diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam memajukan perekonomian. Sesuai dengan rencana induk IKN, keenam klaster tersebut mencakup (Saraswati & Adi, 2022):

1. Klaster Industri Teknologi Bersih bertujuan untuk menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Fokus pengembangan sektor ini terletak pada industri teknologi bersih yang mendukung mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, seperti perakitan panel surya dan produksi kendaraan listrik roda dua.
2. Klaster Farmasi Terintegrasi bertujuan untuk mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan menjadi yang terbaik di kelasnya, untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan kesehatan secara holistik. Pengembangan klaster ini difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologis. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dalam industri farmasi dan untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis Kesehatan
3. Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan responsif terhadap tren kesehatan dan kebugaran masa depan. Fokus pengembangannya terletak pada pengembangan produk-produk seperti protein nabati, herbal dan nutrisi, serta ekstrak tumbuhan. Tujuan klaster ini adalah untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan dan menciptakan solusi pangan yang mendukung kesehatan dan kebugaran di masa mendatang.
4. Klaster Ekowisata Inklusif memiliki misi untuk mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia yang didasarkan pada aset ekowisata dan pariwisata kebugaran, dengan identitas global yang khas Kalimantan Timur. Pengembangan ekowisata ini juga akan didukung oleh sektor pariwisata kota, pertemuan, insentif, konferensi, pameran (MICE), serta turisme kesehatan dan kebugaran. Tujuan klaster ini adalah menciptakan destinasi ekowisata yang tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat secara inklusif.

5. Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia memiliki misi untuk mendirikan pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia untuk sektor yang memiliki potensi permintaan tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Fokus pengembangannya adalah pada oleokimia yang didukung oleh teknologi tinggi hingga menengah, terutama pada perkembangan industri petrokimia dan penyediaan tenaga kerja berkeahlian. Tujuannya adalah memperkuat sektor kimia di wilayah tersebut dan menciptakan peluang pekerjaan yang bermanfaat.
6. Klaster Energi Rendah Karbon memiliki misi untuk mengubah industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi masa depan. Fokus pengembangannya terletak pada jenis-jenis energi seperti biofuel, bahan bakar sintetis, dan proses gasifikasi batu bara. Tujuan klaster ini adalah untuk menciptakan transformasi positif dalam industri energi regional, dengan menitikberatkan pada solusi yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Perekonomian di Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan implementasi mega proyek Nusantara. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan investasi ratusan triliun rupiah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Dengan adanya proyek-proyek strategis nasional (PSN) seperti bandara, jalan tol, dan sektor-sektor industri yang terintegrasi, IKN diharapkan mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang aktivitas ekonomi.

Penting untuk dicatat bahwa pemerataan ekonomi juga menjadi fokus, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, upaya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian, IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal di Ibu Kota Negara (IKN) menjadi suatu aspek kunci dalam memastikan bahwa dampak pembangunan dan perubahan sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh mega proyek ini memberikan manfaat secara merata. Pembangunan sumber daya manusia di masyarakat lokal di perkotaan, tidak hanya tentang masyarakat adatnya saja melalui sektor pendidikan formal, tetapi juga melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi mikro atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dalam hal ini lebih menekankan keberlanjutan hidup. Hal ini karena sektor UMKM tetap

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan ketahanan hidup masyarakat lokal di perkotaan. Proses pemberdayaan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia (Arfriani Maifizar, 2022).

Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, perlu diperhatikan adanya potensi pelanggaran hukum, terutama terkait dengan hak-hak warga lokal. Sebagai negara hukum, Indonesia berpegang pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya perlindungan hukum preventif, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dan memperhitungkan dampak terhadap nasib warga lokal saat mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan terkait pembangunan IKN Nusantara. Hal ini bertujuan agar keputusan atau kebijakan tersebut tidak melanggar hak-hak warga lokal setempat (Handoko & Rohmah, 2022).

Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), wilayah Ibu Kota Negara (IKN) dihuni oleh sekitar 20.000 masyarakat adat yang tergabung dalam 19 kelompok adat di Kabupaten Paser Penajam Utara, serta dua kelompok adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Yayasan Bumi (Bappenas, 2020), suku dengan etnis terbanyak di Kalimantan adalah suku Dayak yang tersebar di bagian selatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Suku Paser mendiami daerah IKN bagian barat, yang termasuk dalam inti wilayah IKN. Di sepanjang wilayah IKN, suku asli Kalimantan hidup berdampingan dengan suku pendatang yang mendiami wilayah tersebut secara merata. Suku Jawa menyumbang sekitar 30,2% dari populasi, diikuti oleh suku Bugis dari Sulawesi Selatan sejumlah 20,6%, dan suku Banjar sekitar 12,4%. Selain itu, terdapat suku minoritas seperti suku Madura, Sunda, Buton, dan Toraja yang juga masih dapat ditemui dalam eksistensinya (Aulia, Putro, & Mufidah, 2023).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian, pengumpulan data, dan analisis yang difokuskan pada deskripsi dan evaluasi aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal. Hal ini mencakup karakteristik sosial-budaya dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Analisis juga mencakup identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dan dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh pemindahan ibu kota dan kehadiran Ibu Kota Nusantara terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip kebijakan sosial dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mencakup beberapa aspek penting. Rudy Soepriyadi menyoroti perkiraan kondisi sosial dan budaya di Ibu Kota Negara Baru, di mana keberagaman budaya diperkirakan akan meningkat, tidak hanya dari

segi etnis, tetapi juga dalam hal ekonomi dan tingkat pendidikan. Urbanisasi diharapkan akan mengarah pada munculnya kota metropolitan.

Penting untuk memperhatikan bahwa keberagaman ini dapat membuka peluang usaha dan pekerjaan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial antar kelompok etnis. Oleh karena itu, prinsip kebijakan sosial harus mengakui dan mengelola keberagaman ini secara bijak, memastikan bahwa pemindahan IKN tidak menyebabkan konflik sosial yang merugikan bagi masyarakat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara Baru. Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini mendorong agar masyarakat lokal tidak terpinggirkan oleh kedatangan pendatang, sehingga pemindahan IKN memberikan dampak positif yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas di wilayah tersebut (Arfani, Sari, & Septianti, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang maksimal dan memperhatikan kepentingan serta aspirasi masyarakat lokal. Ada mekanisme-mekanisme partisipatif yang diberikan, konsultasi publik, pertemuan terbuka yang diadakan secara berkala untuk menjadi platform penyampaian aspirasi bagi masyarakat lokal itu sendiri. Kemudian transparansi informasi untuk keterlibatan masyarakat yang lebih efektif. Informasi terkait rencana pembangunan, dampaknya, dan kebijakan terkait dijelaskan dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup penyediaan dokumen perencanaan, laporan dampak lingkungan, dan data relevan lainnya.

Keterlibatan kelompok-kelompok khusus, seperti kelompok adat, kelompok perempuan, atau kelompok pemuda, juga menjadi fokus utama. Konsultasi khusus dengan kelompok-kelompok ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan pandangan unik mereka serta memastikan bahwa suara mereka diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, Pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal menjadi prioritas. Program pelatihan dan pendidikan diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembangunan, hak-hak masyarakat, dan cara mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan nomor 189/3836/BPD diterbitkan dengan maksud utama meminta kepala kota atau kabupaten untuk menjaga dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat yang seharusnya dihormati. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pemerintah daerah diharapkan melakukan verifikasi dan pengesahan keberadaan masyarakat hukum adat

terlebih dahulu. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menerbitkan peraturan penetapan apabila terdapat bukti yang ditemukan dalam proses verifikasi dan pengesahan, menunjukkan bahwa suatu masyarakat dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat. Berdasarkan isi surat edaran tersebut, diharapkan bahwa pemerintah daerah melakukan tahap awal verifikasi dan pengesahan untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat. Setelah proses tersebut selesai, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan peraturan penetapan, yang akan diambil jika dalam proses verifikasi dan pengesahan terkonfirmasi adanya masyarakat adat yang sah dan asli (Aulia, Putro, & Mufidah, 2023).

Partisipasi politik masyarakat adat, sejalan dengan masyarakat sipil, merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Upaya pelestarian dan perlindungan hak-hak masyarakat adat mencakup dimensi sosial budaya, politik, serta ekonomi. Hak ulayat terhadap tanah dan pengelolaan hutan termasuk hak paling fundamental dalam keyakinan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kepemilikan tanah di tanah adat sangat krusial untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang mereka (Wiersma, 2005).

D. Keberlanjutan Lingkungan

Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam konteks pemindahan Ibu Kota Nusantara, terutama karena Pulau Kalimantan, sebagai lokasi baru Ibu Kota, memiliki ekosistem yang perlu diperhatikan secara serius dalam perencanaan pembangunannya. Pulau ini terkenal dengan luasnya hutan dan keberagaman hayati, sehingga pembangunan di sana dapat berdampak signifikan pada habitat flora dan fauna yang ada. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Nusantara juga memiliki dampak sosial terhadap masyarakat lokal yang telah lama menetap di wilayah tersebut, yang selama ini menjauh dari keramaian dan kepadatan kota (Isnaini & Zamzamy, 2023). Meskipun pemerintah menyadari dampak lingkungan dari perkembangan Ibu Kota Negara di Kalimantan, tetapi tetap melanjutkan realisasi proyek ini. Rencananya, Ibu Kota Negara akan dibangun di wilayah seluas 256.142 hektar daratan dan 68.189 hektar wilayah laut, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan proyek ini meskipun mengetahui implikasi lingkungan yang melibatkan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan (Muharrami, 2022).

Menurut penelitian LIPI tahun 2019, Pulau Jawa diprediksi akan mengalami peningkatan defisit air hingga tahun 2070. Faktor utama yang menyebabkan krisis air di Jawa adalah perubahan iklim. Perubahan ini diantisipasi akan berdampak pada neraca air, yang kemudian signifikan mempengaruhi ketersediaan air. Hal ini menjadi lebih kompleks karena kebutuhan air meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola tata guna lahan. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk dan kebutuhan air domestik di setiap wilayah cenderung meningkat. Dalam rentang tahun 2021 hingga 2050, Pulau Jawa

diproyeksikan memiliki rata-rata jumlah penduduk sebanyak 193.82 juta jiwa, dengan kebutuhan air domestik mencapai 14.15 miliar m³. Perubahan terbesar dalam indeks kekritisian air teramati di Provinsi DKI Jakarta, mengalami kenaikan sebesar 52.03%, sehingga menjadikan status daerah tersebut berada pada kondisi sangat kritis pada periode tahun 2021-2050 (Saraswati & Adi, 2022).

Selain itu, hal seperti konflik agraria juga menjadi rentan terjadi ketika melihat proyek strategis nasional ini. Hal ini memiliki akar penyebab utama yang berasal dari dominasi sistem penguasaan tanah yang bersumber dari hukum negara. Dalam konteks ini, negara memberikan layanan yang sangat besar pada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam pengelolaan tanah dan kekayaan alam lainnya, termasuk hasil-hasil hutan. Pada saat yang sama, hak-hak masyarakat setempat yang telah lama hidup dan mengembangkan sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaan alam tersebut diabaikan dan dilanggar. Penekanan bahwa tidak hanya terjadi dominasi satu sistem hukum (hukum negara), tetapi juga praktik dominasi negara terhadap masyarakat yang dicirikan oleh unsur-unsur kekerasan struktural (*structural violence*). Ini terjadi karena sumber utamanya berasal dari aparat negara yang mengeksploitasi dan merugikan masyarakat setempat dalam konteks penguasaan tanah dan sumber daya alam (Rachman, 2016)

Mega proyek Nusantara dengan biaya ratusan triliun, terutama dalam hal infrastruktur, membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas. Sebagian tanah berada di bawah kepemilikan negara, sementara yang lainnya dimiliki oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat setempat. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi menimbulkan banyak masalah sosial di masyarakat, salah satunya adalah konflik agraria. Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Hadi Jatmiko, mengemukakan bahwa wilayah IKN mencakup area yang dihuni oleh masyarakat adat, menunjukkan bahwa perpindahan ini berpotensi memicu konflik agraria yang berkepanjangan. Secara faktual, masalah lahan IKN disebutkan terkait dengan berbagai perizinan, termasuk pertambangan hutan dan perkebunan kelapa sawit. Namun, yang tak kalah penting, terdapat masyarakat adat yang sudah menetap di sana selama puluhan tahun (Sholahudin & Sair, 2022).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengemukakan prediksi bahwa mega proyek Ibu Kota Negara baru di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berpotensi memicu konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak. Ketua Departemen Bidang Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian Maulana, menyamakan megaprojek ini dengan proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya yang juga kerap memicu konflik agraria, termasuk pembangunan bandara, bendungan, jalan tol, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan sebagainya. Potensi konflik agraria yang berdimensi hukum dalam

Pembangunan IKN, perlu untuk diantisipasi dan diminimalisir. Untuk mereduksi ketegangan dan konflik hukum dalam konflik agraria, pemerintah perlu untuk melakukan, Pertama, perlu ada pembacaan dan pemahaman baru tentang relasi keduanya (hukum negara dan hukum rakyat).

Negara dengan sistem hukumnya yang legal-formal, perlu memahami bahwa ada kelemahan internal dalam sistem hukum negara. Kelemahan tersebut dapat ditutup dengan mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan hukum rakyat yang sudah puluhan tahun menjadi bagian inheren dalam kehidupan komunitas lokal, termasuk dalam urusan pengaturan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Keberadaan dan kebutuhan hukum rakyat/adat, dalam pandangan Sumardjono, masih dibutuhkan dalam penyelesaian konflik agraria. Hukum adat/rakyat diperlukan sebagai unsur yang bersifat komplementer untuk melengkapi norma yang belum diatur dalam hukum negara, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat karena mengandung muatan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Eksistensi dan keberlakuan hukum rakyat/adat dalam pengelolaan sumber-sumber agraria memiliki dasar sosio-historis yang kuat dan tidak dapat dihapuskan dengan mudah. Hukum negara perlu mengakomodir hukum yang hidup, terus berkembang, dan terus-menerus dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas lokal, yang sering disebut sebagai "*the living law*" (Soemardjono, 2018).

Keberlanjutan lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Pemerintah perlu menjalankan serangkaian kebijakan dan tindakan yang berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya alam. Ekologi di Ibu Kota Negara (IKN) menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Pengembangan IKN akan memperhatikan harmoni antara manusia dan alam, dengan melibatkan upaya pelestarian habitat asli, konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Sistem pengelolaan air, transisi ke energi terbarukan, dan pemantauan kualitas udara akan menjadi bagian integral dari perencanaan untuk menjaga kelestarian ekologi. Dengan memperhatikan ekologi, IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya dan berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati serta keseimbangan alam.

KESIMPULAN

Dalam mengakhiri analisis diskursus mengenai pemerataan ekonomi dalam pembangunan nasional Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat disimpulkan bahwa proyek ini melibatkan beberapa dimensi penting, termasuk infrastruktur, keberlanjutan lingkungan,

regulasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pertama, pengembangan infrastruktur di IKN diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatkan konektivitas dan memberdayakan sektor-sektor baru, proyek ini memiliki potensi besar untuk menyebarkan manfaat ekonomi ke berbagai wilayah. Kedua, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sekitar IKN. Langkah-langkah konservasi, pelestarian hutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ini.

Ketiga, regulasi ekonomi yang diterapkan di IKN akan memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan bisnis yang kondusif. Kebijakan yang mendukung investasi, mendorong inovasi sektor ekonomi, dan memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi landasan moral dan sosial dalam proyek ini. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memberikan kesempatan ekonomi yang adil akan membantu mewujudkan pemerataan yang berkelanjutan. Terlepas daripada pro-kontra terhadap mega proyek ini, dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara seimbang, proyek IKN memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang besar bagi pemerataan ekonomi dan perkembangan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. Copyright @ Dea Risti Aulia, Herjuno Putro, Laras Dwi MufidahINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.

Arfani, Z., Sari, A. M., & Seprtianti, R. (2023). Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1-8.

Arfriani Maifizar, S. R. (2022). PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT LOKAL TERHADAP DAYA SAING AKTIVITAS EKONOMI DI IBU KOTA BARU. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, 161-166.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 2655 - 2672 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2642

Asmorowati S, C. H. (2022). PERAN POLICY ENTREPRENEUR DALAM. Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, 202-206.

Dian Noviyanti, A. E. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK ARAHAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH PENGEMBANGAN. Jurnal Geografi, 57-73.

Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA LOKAL ATAS DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA. Balikpapan: Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI.

Hutasoit, W. L. (2018). ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA. Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 108-128.

Isnaini, D. F., & Zamzamy, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia.com dan Kompas.com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.

Latip, D. (2009). ANALISA PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG (FDI) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Mazda, C. N. (2022). ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP SOCIAL SECURITY. Jurnal Enersia Publika, 1-12.

Muharrami, N. (2022). TRATEGI PEMBANGUNAN IKN BERBASIS LINGKUNGAN. Kalimantan Barat. Retrieved from <https://kalbarprov.go.id/berita/strategi-pembangunan-ikn-berbasis-lingkungan.html>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 2655 - 2672 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2642

Priadi, G. (2018). Pemerataan Sebagai Arahana Rencana Dan Strategi Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cianjur. Bogor: Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2022). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Prespektif Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha.

Rachman, N. F. (2016). Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria; Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global. Yogyakarta: Insist Pres.

Ritonga, M. K. (2017). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA. Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan, 79-82.

Rustan, Z. S. (2021). Penguatan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Ibu Kota Negara. Samarinda: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Rustiadi E, S. S. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Saraswati, M. K., & Adi, E. A. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 4042-4052.

Sholahudin, U., & Sair, A. (2022). PEMBANGUNAN IKN, KONFLIK AGRARIA, DAN RUANG DELIBERASI HUKUM. Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, 110-114.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 2655 - 2672 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2642

Siti Jubaidah, N. I. (2022). ANALISIS PERAN SEKTOR UNGGULAN UNTUK KEMAJUAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN UTARA. *Inspire Journal Economics and Development Analysis*, 85-102.

Sjahrizal, R., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi. *E-Jurnal Prespektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.

Soemardjono, M. S. (2018). Pluralisme Hukum Sumebr daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Keadilan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Wiersma, L. (2005). Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to Indigenous Land Claims. *Duke Law Journal*.